

IMPLEMENTASI PROGRAM WIRAUSAHA MUDA PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SUMENEP

Oleh:

Mohammad Hamzah Khairil Lutfi¹⁾ Enza Resdiana²⁾ Ach. Andiriyanto³⁾
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja Madura

Email: hamzahgaul46@gmail.com

Abstrak

Program wirausaha muda merupakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Sumenep yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara swakelola kepada PPLP PGRI Sumenep (ETDC). Program wirausaha muda menargetkan terciptanya 5000 wirausahawan muda baru dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2016 lalu dengan harapan terbukanya usaha-usaha baru yang dapat membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Kabupaten Sumenep. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan program wirausaha muda. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teori pendekatan implementasi Mazmanian, Daniel A dan Sabatier, Paul A sebagai pisau analisis, adapun fokus penelitian yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan program wirausaha muda. Selanjutnya teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan program wirausaha muda masih belum maksimal dan berjalan sesuai rencana. Berdasarkan fokusnya 1) Karakteristik masalah yang dihadapi tidak mudah dan terdapat banyak hambatan sehingga tidak optimal. Banyak mengalami penyusutan pemenuhan jumlah peserta. Pemahaman nilai-nilai kewirausahaan yang ada pada diri alumni wirausaha muda masih kurang. 2) Karakteristik Kebijakan, Program wirausaha muda masih belum memberikan hasil yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Sumenep. Hal tersebut dapat dilihat dari sedikitnya alumni wirausaha muda yang berhasil mendirikan usaha secara mandiri. Pendataan terhadap para alumni wirausaha muda masih kurang dan terbatas. 3) Lingkungan Kebijakan, dalam hal ini sudah mendukung terhadap proses pelaksanaan program wirausaha muda, namun kemampuan implementor masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Wirausaha Muda, Pengangguran, Swakelola.

1. PENDAHULUAN

Banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia terutama pada umur produktif tak lepas dari paradigma berpikir (*mindset*) generasi muda yang rata-rata ingin menjadi pegawai di suatu perusahaan atau instansi pemerintah, sementara ketersediaan lapangan kerja pada sektor formal sangat terbatas. Hal ini sangat disayangkan, mengingat kemampuan dan kreativitas generasi muda saat ini sangat tinggi dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Permasalahan utama dalam pengembangan kewirausahaan pemuda yakni karena kurangnya kesadaran akan pentingnya menjadi pemuda yang mandiri dan berwirausaha. Pengembangan terhadap kewirausahaan pemuda adalah suatu proses yang dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Akibat semakin banyaknya jumlah pengangguran, maka semakin dirasakan pentingnya dunia usaha. Pembangunan akan lebih mantap jika ditunjang oleh adanya wirausahawan, karena kemampuan pemerintah sangat terbatas dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pemerintah tidak mampu menggarap semua aspek pembangunan karena sangat membutuhkan anggaran belanja, personalia, dan pengawasannya. Oleh karena itu, wirausaha merupakan potensi

pembangunan baik dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri.

Menurut Badan Statistik (BPS) jumlah pengangguran pada tahun 2014 berada pada angka 7,24 juta orang atau 5,94% dan mengalami kenaikan pada tahun 2015 per agustus sebanyak 7,56 juta orang atau 6,18% dari total angkatan kerja Indonesia sebanyak 122,4 juta orang, sedangkan tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan didominasi oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan jumlah 12,65%, kemudian disusul oleh lembaga formal pendidikan lainnya, yaitu SMA, Diploma, Sarjana, SMP, dan SD kebawah (BPS dalam beritatrans.com, 14 Desember 2019). Angka tersebut merupakan total jumlah dari keseluruhan angka pengangguran yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia termasuk salah satunya adalah Kabupaten Sumenep.

Data pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinakertrans) Kabupaten Sumenep pada 2014 menunjukkan tenaga kerja tidak terserap secara maksimal baik oleh perusahaan maupun instansi pemerintah. Jumlah pencari kerja dari 40.762 jiwa yang terserap hanya 17.144 jiwa, yang artinya sisa dari jumlah tersebut adalah menganggur. Selanjutnya, data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep pada tahun 2015 masih relatif tinggi yaitu sebesar 2,07%. Angkatan kerja akan selalu

bertambah setiap tahun disebabkan adanya lulusan-lulusan sekolah seperti halnya SMK, SMA, dan perguruan tinggi. Data menunjukkan bahwa persentase dan angka lulusan SMK, SMA, dan perguruan tinggi yang menganggur relatif tinggi (Dalam situs sp. Beritasatu.com. Diakses 14 Desember 2019).

Solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan terus diupayakan dalam mengentaskan pengangguran adalah melalui sektor wirausaha. Sektor ini diyakini akan mampu mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Melalui wirausaha atau kewirausahaan, setiap orang akan akan dilatih untuk mandiri, inovatif, dan peka terhadap peluang. Menurut Yuniarta, dkk (2015: 01) yang dimaksud kewirausahaan adalah usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja dan hasilnya berguna bagi orang lain. Pada sektor ini, setiap orang memiliki peluang untuk menjadi wirausahawan. Kewirausahaan dapat mengubah yang sebelumnya *mindset* “pekerja” menjadi “pemberi kerja”, oleh karena itu para pemuda (terutama para pencari kerja terdidik) harus didorong untuk bisa berwirausaha sebagai solusi ditengah ketatnya persaingan kerja.

Berangkat dari persoalan di atas, berdasarkan peraturan yang mengacu pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam rangka untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Sumenep mengupayakan salah satunya melalui program 5000 wirausaha muda yang dilakukan dengan cara swakelola pada pihak ketiga yaitu PPLP PGRI Sumenep . Program ini merupakan salah satu dari 9 program unggulan Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana yang termaktub dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 yang menargetkan tercetak 1000 wirausahawan baru setiap tahunnya selama jangka waktu 5 tahun. Kelompok sasaran dalam program ini adalah dari kalangan para pemuda usia 16-35 tahun.

Adapun pelaksanaan program wirausaha muda pada awalnya (2016) dilaksanakan oleh 8 OPD terkait, seperti Dinas Pertanian, Dinas perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pariwisata dan BPMPKB, namun pada tahun 2017 kegiatan pelaksanaannya di satu pintukan pada Dinas koperasi dan usaha mikro Kabupaten Sumenep yang kemudian diswakelolakan kepada pihak ketiga yaitu PPLP PGRI Sumenep.

Program wirausaha muda tersebut dilaksanakan dengan model inkubasi. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi. Peserta pelatihan dalam program ini diinkubasi melalui beberapa tahapan yang ada, yaitu pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi, jadi tidak hanya diberikan pelatihan saja melainkan juga pendampingan, proses produksi hingga pada jalur pemasarannya.

Adapun jenis pelatihan pelatihan yang diberikan bermacam-macam setiap tahunnya, diantaranya seperti perbengkelan *CNC Router*, konveksi, *chatering*, percetakan, budi daya jamur dan lebah madu, dll. Melalui program tersebut diharapkan dapat mencetak para pemuda menjadi wirausahawan yang handal dan dan berdaya saing sehingga kedepannya dapat membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Selama empat tahun sejak tahun 2016 program ini berjalan, tentunya tidak terlepas dari hambatan atau hal-hal yang tidak sesuai dalam implementasi atau pelaksanaannya. Adapun persoalan yang berkenaan dengan implementasi program ini yakni, banyak pihak seperti halnya akademisi, aktivis, organisasi masyarakat, dan sebagainya yang menganggap program

tersebut tidak optimal serta tidak mampu menekan angka pengangguran secara signifikan, menurut Korlap Aksi Mahasiswa Salamet Riady, angka pengangguran di Sumenep tidak banyak mengalami perubahan meskipun sudah ada program tersebut, ia juga menganggap dibentuknya korporasi (rumah produksi) tidak dapat membentuk wirausahawan yang mandiri (Dalamsitus www.timesindonesia.co.id). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep tingkat pengangguran masih berada diatas 1% , pada tahun 2017 tingkat pengangguran sebesar 1,83 %, di tahun 2018 mengalami penurunan namun tidak signifikan menjadi 1,79%, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,38% menjadi 2,17 %. Program tersebut juga pernah vakum atau mandeg dalam beberapa waktu.

Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana “Implementasi Program Wirausaha Muda Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep” oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang mendalam tentang sejauh mana implementasi atau pelaksanaan program ini dalam mengembangkan potensi keterampilan pemuda dan kemandirian berusaha sehingga dampaknya bisa membuka lapangan kerja baru dan menekan angka pengangguran yang masih tinggi.

Penelitian terhadap implementasi suatu program sangat penting dilakukan mengingat implementasi sendiri merupakan kunci utama dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan.

2. TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan pada dasarnya diartikan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan tindakan-tindakan yang terarah. Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "policy" yang diterjemahkan menjadi "kebijakan" yang berbeda artinya dengan kata "wisdom" yang artinya kebijaksanaan. Dye yang dikutip oleh Pasolong (2016: 39) dalam bukunya "Teori Administrasi Publik" mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pendapat tersebut mengatakan bahwa segala tindakan yang diambil pemerintah adalah suatu hal yang sudah ditetapkan. Dye juga mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi kebijakan menurut Gordon yang dikutip oleh Pasolong (2016: 58) dalam bukunya "Teori Administrasi Publik" mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Administrator dalam hal ini mengatur cara untuk mengorganisir dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir yaitu mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen yang ada untuk mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program.

Menurut Grindle yang dikutip oleh Agustino (2016: 129) mengatakan bahwa "pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat dari *action* program dari *individual project* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai."

Model Pendekatan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Ada tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Subarsono (2015: 94) yaitu sebagai berikut:

1. Karakteristik Masalah

Karakteristik Masalah. yang dihadapi dan akan digarap tentu mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Hal tersebut juga akan mempengaruhi terhadap proses implementasi. Adapun variabel yang perlu diperhatikan adalah tingkat kesulitan teknis, tingkat kemajemukan kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran dan cakupan perubahan perilaku yang diinginkan.

2. Karakteristik Kebijakan

Berkaitan dengan kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat, adapun variabel yang perlu diperhatikan adalah kejelasan dan konsistensi tujuan, seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis, ketepatan alokasi sumber dana, seberapa besar keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, rekrutmen pejabat pelaksana, keterbukaan terhadap pihak luar.

3. Lingkungan Kebijakan

Kondisi-kondisi tertentu pada lingkungan kebijakan akan turut mempengaruhi proses dan hasil dari program itu sendiri, beberapa diantaranya, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi, dukungan masyarakat, serta komitmen dan kemampuan pelaksana merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam sebuah kebijakan.

Pengertian Wirausaha

Dalam lampiran Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil Nomor 961/KEP/M/XI/1995, dicantumkan bahwa:

1. Wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan.
2. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Jadi wirausaha itu mengarah kepada orang yang melakukan usaha/kegiatan sendiri dengan segala kemampuan yang

dimilikinya. Sedangkan kewirausahaan menunjuk kepada sikap mental yang dimiliki seorang wirausaha dalam melaksanakan usaha/kegiatan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep sebagai *leading sector* program Wirausaha Muda. Adapun fokus penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan yang diambil dari model pendekatan Mazmanian, Daniel A dan Sabatier, Paul A dalam Subarsono (2015: 95), yaitu meliputi, Karakteristik Masalah, Karakteristik Kebijakan, dan Lingkungan Kebijakan.

Sumber data pada penelitian yang akan digunakan oleh peneliti berupa sumber data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri dengan dibantu alat bantu lain yaitu pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap obyek dan informan atau subyek penelitian. Teknik yang dapat dipakai dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan model Miles and Huberman yang dikutip oleh Sugiyono

dalam bukunya (2015: 246-253) ada beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah peneliti lakukan melalui teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi didapat bahwa implementasi program mencetak 5000 wirausaha muda pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep yang dalam pelaksanaannya di swakelola kepada PPLP PGRI (ETDC) dapat dikatakan belum berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Sumenep dengan cara menciptakan wirausahawan yang profesional yang dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Proses pelaksanaan program mencetak 5000 wirausaha muda tidak memberikan hasil yang maksimal dikarenakan terdapat hambatan-hambatan didalamnya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Carl J. Frederick yang dikutip oleh Leo Agustino (2008:07) bahwa “kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat

hambatan- hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

1. Karakteristik masalah

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi didapatkan kesimpulan bahwa karakteristik masalah diukur dari tingkat kesulitan teknis, proporsi dan keberagaman kelompok sasaran, dan cakupan perubahan perilaku yang dikehendaki pada program 5000 wirausaha muda tidaklah mudah dan terdapat banyak kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaannya sehingga berpengaruh terhadap hasil pelaksanaannya yang tidak optimal.

a. Tingkat kesulitan teknis

Tingkat kesulitan teknis pelaksanaan program wirausaha muda pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep tidak mudah karena memiliki proses dan tahapan yang panjang. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, waktu atau jadwal pelatihan masih kurang fleksibel, serta alur kegiatan pelatihan tidak dijelaskan pada proses sosialisasi sehingga banyak peserta memilih mundur karena baru mengetahui

alur kegiatan yang akan dihadapi cukup panjang dan berbenturan dengan aktifitas mereka yang lain. Padahal Menurut Daniel, A. Mazmanian dan Paul, A. Sabatier dalam Subarsono (2015: 95) mengatakan bahwa “tercapai atau tidaknya suatu kebijakan tergantung pada sejumlah hal, termasuk diantaranya tersedianya atau dikembangkannya teknik-teknik tertentu”. Seharusnya tingkat kesulitan teknis yang dihadapi oleh program harus pula disertai pengembangan teknik yang tepat.

b. Proporsi dan keberagaman kelompok

Pemenuhan target jumlah peserta sebesar 1000 per tahun tidak mudah dan mengalami banyak penyusutan. Berdasarkan hasil temuan lapangan, penyebabnya yaitu pada jeda waktu pelaksanaan, jarak daratan-kepulauan, serta kendala lainnya. Proporsi yang besar dengan berbagai macam latar belakang pendidikan peserta (kemampuan) wirausaha muda dan jenis pelatihan yang beragam berpengaruh terhadap sulitnya pelaksanaan program wirausaha muda. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Daniel, A. Mazmanian dan Paul, A. Sabatier dalam Subarsono (2015:

95).

- c. Cakupan perubahan perilaku yang dikehendaki

Perubahan perilaku yang dikehendaki dalam program ini adalah terinternalisasinya nilai-nilai kewirausahaan seperti, memiliki etos kerja yang tinggi, kreatif, inovatif, dan mandiri. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti terhadap alumni wirausaha muda rata-rata hanya sekedar tahu namun belum mampu mewujudkan nilai-nilai tersebut secara nyata.

2. Karakteristik kebijakan

- a. Kejelasan dan konsistensi tujuan

Setiap program harus memiliki tujuan yang jelas sebagai dasar dan penentu arah dalam pelaksanaannya. Sebagai program prioritas Kabupaten Sumenep, Wirausaha Muda dibentuk dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Sumenep. Menurut Grindle yang dikutip oleh Agustino (2016: 129) dalam bukunya “Dasar-dasar Kebijakan Publik” mengatakan bahwa “pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan

mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat dari *action* program dari *individual project* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

Sejauh ini program wirausaha muda belum memberikan hasil yang signifikan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Data menyebutkan, beberapa alumni wirausaha muda berhasil membangun usaha secara mandiri dan berhasil mempekerjakan antara 3-9 orang, namun sementara sebagian lainnya masih belum terdata secara menyeluruh. Selain itu, sisa alumni lainnya yang bergabung pada rumah produksi berjumlah 350 orang. Berdasarkan data tersebut, peneliti juga membandingkan dengan tingkat pengangguran di Kabupaten Sumenep selama 3 tahun terakhir, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep tingkat pengangguran masih berada diatas 1%, pada tahun 2017 tingkat pengangguran sebesar 1,83 %, di tahun 2018 mengalami penurunan namun tidak signifikan menjadi 1,79%, pada tahun 2019

mengalami kenaikan sebesar 0,38% menjadi 2,17%.

Hasil capaian yang belum signifikan tersebut tidak terlepas dari berbagai macam hambatan dan kesulitan-kesulitan di dalamnya. Kesiapan setiap alumni wirausaha muda untuk membuka usaha secara mandiri masih kurang, oleh karena itu sebagai bentuk penkonsistenan terhadap tujuan, pelaksana program melakukan monitoring dan evaluasi baik kepada alumni pada rumah produksi maupun yang diluar rumah produksi guna mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan, namun monitoring hanya dilakukan kepada alumni yang telah terdata saja. Selain itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga membentuk koperasi WMS (wirausaha muda sumenep) dan membantu memasarkan hasil produksi alumni wirausaha muda melalui klinik UMK (usaha mikro dan kecil).

b. Dukungan Teoritis

Kegiatan berbasis riset dilakukan pada tahun 2016, yaitu riset *business plan* yang kemudian dijadikan acuan untuk

menentukan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Pada indikator ini, langkah yang diambil oleh pelaksana berupa kegiatan riset sudah tepat dilakukan sehingga segala keputusan yang diambil mempunyai dasar yang kuat dan valid untuk dilaksanakan sebagaimana yang disampaikan oleh Daniel, A. Mazmanian dan Paul, A. Sabatier dalam Subarsono (2015: 95)

c. Ketepatan alokasi sumber dana

Ketepatan alokasi dana sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari kejelasan sumber, penggunaan serta pengawasannya. Sumber dana program 5000 wirausaha muda berasal dari APBD II dan DBHCHT (dana bagi hasil cukai hasil tembakau). Sedangkan jumlah alokasinya sebesar 4 miliar per tahun. Penggunaan terhadap anggaran wajib dilaporkan (pengawasan) secara rutin oleh pihak ketiga kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai bentuk pertanggungjawaban anggaran terhadap pemilik program. Pemberian bantuan peralatan tidak diberikan perindividu melainkan secara kelompok.

d. Keterpaduan hirarkis diantara lembaga atau instansi-instansi

terkait Proses koordinasi vertikal maupun horizontal sudah terjalin dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk koordinasi yang terjalin baik antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan ETDC dan OPD-OPD terkait. Koordinasi antar pihak terkait dilakukan dalam berbagai cara, diantaranya adalah rapat bersama dan rapat percepatan program wirausaha muda.

e. Kejelasan dan konsistensi

Aturan yang ada pada badan pelaksana Aturan dasar yang dipakai sudah jelas namun masih belum konsisten. Dasar pelaksanaan program wirausaha muda mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun pada tahun 2018 menemui kendala dengan adanya aturan baru sehingga harus melakukan penyesuaian. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan program tertunda.

f. Perekrutan pejabat pelaksana

Secara kualitas dan kuantitas pejabat pelaksana (ETDC) sudah memadai. proses perekrutan pegawainya dipilih

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Pelaksanaan program wirausaha muda diswakelolakan kepada PPLP PGRI Sumenep sebagai pelaksana kegiatan. Pemilihan PPLP PGRI Sumenep sebagai pihak ketiga merupakan tindakan yang dianggap tepat dengan pertimbangan memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

g. Keterbukaan terhadap pihak luar

Pihak pelaksana baik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep maupun ETDC (*entrepreneurship training development center*) sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi dan mengontrol jalannya program wirausaha muda.

3. Lingkungan kebijakan

a. Kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kemajuan teknologi

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat Sumenep sangat terbuka terhadap program ini. Hal tersebut dapat dilihat dari antusiasme masyarakat terhadap adanya program wirausaha muda. Tekonologi yang digunakan dalam pelatihan wirausaha muda sudah memadai, karena menggunakan mesin canggih dan modern berskala

industri.

b. Dukungan Publik

Masyarakat Sumenep sangat mendukung terhadap adanya program wirausaha muda. antusiasme masyarakat Sumenep untuk berpartisipasi terhadap program wirausaha muda cukup besar, baik masyarakat kepulauan maupun daratan.

c. Tingkat Komitmen dan Kemampuan Implementor atau Pelaksana

Komitmen pelaksana dalam pogram wirausaha muda sudah cukup baik, hal tersebut ditunjukkan dalam bentuk pengupayaan yang terbaik melalui pelatihan dan pendampingan yang konsisten.

Peneliti menggariskan bahwa kemampuan implementor dalam pencapaian tujuan masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari teknik yang dikembangkan masih kurang fleksibel, pemahaman nilai-nilai kewirausahaan para alumni masih kurang, pendataan terhadap alumni masih terbatas dan tidak menyeluruh. Pencapaian tujuan masih belum memberikan efek yang signifikan.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program wirausaha muda pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep yang dalam pelaksanaannya di swakelola kepada PPLP PGRI (ETDC) masih belum sepenuhnya berhasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Sumenep dengan cara menciptakan wirausahawan muda yang dapat membuka usaha dan peluang kerja bagi masyarakat. Proses pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan di dalamnya.

Adapun rekomendasi yang dapat ditawarkan yaitu:

1. Karakteristik Masalah

- a. Perlu adanya pembagian waktu yang fleksibel dalam pelaksanaan kegiatan wirausaha muda yaitu dengan membagi waktu kegiatan menjadi dua sesi, pagi dan siang, sehingga peserta dapat memilih dan mengikuti pelatihan tanpa harus berbenturan dengan aktifitas atau kegiatan yang dimiliki

diluar program. serta perlu adanya penjelasan alur dan waktu kegiatan pelatihan secara ringkas dalam proses sosialisasi terhadap masyarakat atau kelompok sasaran baik secara *offline* yaitu melalui kecamatan maupun secara *online* dengan membuat bagan alur kegiatan pada pamflet atau brosur yang dibagikan secara *online*.

- b. Perlu adanya penguatan yang lebih, dalam menginternalisasi nilai-nilai kewirausahaan terhadap para peserta pelatihan agar mampu mempunyai sikap dan perilaku kewirausahaan yang kuat serta mempunyai visi yang jauh kedepan dalam membangun usaha

2. Karakteristik Kebijakan

Perlu adanya pendataan yang menyeluruh terhadap para alumni wirausaha muda guna mengetahui atau memantau perkembangan usaha yang dimiliki. Pendataan diharapkan tidak hanya dengan cara *offline* atau penyisiran saja, namun juga harus berbasis *online system* atau pendataan yang terapkan secara sistem untuk

mempermudah mendata banyaknya jumlah alumni wirausaha muda. Pendataan secara *offline* juga dapat dilakukan dengan cara mengadakan forum temu alumni sebagai sarana atau media pendataan.

3. Lingkungan Kebijakan

Diperlukan adanya evaluasi ulang secara keseluruhan oleh semua pihak atau instansi yang terlibat. Evaluasi diharapkan tidak hanya berfokus terhadap pemecahan masalah saja, tapi lebih difokuskan pada langkah-langkah antisipatif sehingga tidak muncul masalah- masalah baru di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguatino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta
- Basia, Lusmino. Dkk. 2016. "Strategi Pengembangan Wirausaha Pemuda Dalam Mewujudkan Wirausahawan Mandiri dan Implikasinya Terhadap

- Ketahanan Ekonomi Keluarga”. Dalam Jurnal Ketahanan Nasional. Vol.22 No.1
- Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 961/KEP/M/XI/1995
- Maryati, Sri. 2015. “Dinamika Pengangguran Terdidik, Tantangan Menuju Bonus Demografi di Indonesia”. Dalam Jurnal *Economic And Economic Education*. Vol. 03 No. 02 !124-136)
- Moloeng, Lexy J. 2015. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Pembaruan, Suara. Partai Demokrat Soroti Isu Pengangguran dan Lapangan Kerja. Dalam Situs sp.beritasatu.com. Diakses pada 14 Desember 2019 Pukul 09.00 WIB
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
- Rahim A, Rahman. Dkk. 2017. “ Strategi Implementasi Model Pengembangan Wirausaha Muda Bagi Masyarakat Pesisir Kabupaten Takalar”. Dalam Jurnal Balance. Vol. XIV No. 2
- Rasulong, Ismail. Dkk. 2018. “ Dampak Implementasi Model Inkubator Bisnis dan Partisipasi Lintas Aktor Dalam Pengembangan Wirausahawan Muda di Wilayah Pesisir Kabupaten Takalar”. Dalam Jurnal Ekonomi. Vol. 02 No. 01
- Rosy. Bupati Sumenep Ingin Kurangi Pengangguran Melalui Program Wirausahawan Muda. Dalam situs mediamadura.com. Diakses pada 15 Desember 2019 pukul 10.00 WIB
- Sadono, Sukirno. 2010. *Makro Ekonomi. Teori pengantar*. Edisi ketiga. Jakarta: PT Raja Grasindo Persada
- Sedarmayanti. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sukmadinata, Nana S. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Suryana. 2003. *Kewirausahaan: Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat

Trans. Bps Angka Pengangguran Tahun 2015 Merangkak Naik. Dalam Situs beritatrans.com. diakses pada 15 Januari 2020

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan Formulasi Kebijaksanaan Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Yahya P, Mahendra. Dkk. 2018. "Implementasi Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula di Kementerian Koperasi dan Ukm". Dalam Jurnal Profit. Vol. 12 No. 02

Undang-Undang No. 40 Tahun 2009, Tentang Kepemudaan